KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN AIR BERSIH

(Studi Governabilitas Pemerintah Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Vinore Bitu Meja

(18520006)

PRODI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

SKRIPSI

KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN AIR BERSIH (*Studi Governabilitas Pemerintah Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul)*

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Serjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P) Pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Disusun Oleh:

Vinore Bitu Meja

(18520006)

PRODI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dengan mempertahankan didepan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Serjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Maret 2022

Jam : 09:00

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	**Tanda Tangan**
1. Drs. Sumarjono, M.si **Ketua/Pembimbing**	
2. Ir. Muhammad Barori, M.Si **Penguji Samping I**	
3. Dra, B Hari Saptaning Tyas, M.si **Penguji Samping II**	

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

iii

LEMBARAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan bahwa penulisan skripsi yang berjudul "Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Penyediaan Dan Pengembangan Jaringan Air Bersih (Studi Governabilitas Pemerintah Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul)" ini benar-benar merupakan hasil penelitian saya sendiri, serta saja tidak melakukan penjiblakan atau pengutipan kecuali yang ada di daftar pustakan. Saya bersedia menaggung resiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 28 Maret 2022

Vinore Bitu Meja

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya yang telah dicurahkan-Nya yang tak perna henti-henti meberikan petujuk dan kelancaran. Skripsi yang berjudul KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN AIR BERSIH (STUDI GOVERNABILITAS PEMERINTAH KALURAHAN WUKIRSARI, KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL), penelitian Kualitatif-Deskriptif di Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Penguji Samping sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pencerahan dengan penuh kesabaran sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Bapak Ir. Muhammad Barori, M.Si selaku Dosen Penguji Samping yang telah memberikan saran dan kritik dalam memperbaiki skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
7. Pemerintah Kalurahan Wukirsari dan Masyarakat Kalurahan Wukirsari penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga atas kerjasama sehingga dapat membantu penulis mendapat data-data yang dibutuhkan.
8. Keluarga Besar penulis yang telah memberikan banyak dukungan, baik moril maupun material.
9. Teman-teman Mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan yang menjadi motivator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam usaha penyusunan skripsi, ini tidak luput dari kekuranngan dan hambatan maupun rintagan, yang tentunya pada skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Kesehatan dan melimpahkan Karunia-Nya kepada Bapak, Ibu Dosen berserta semua pihak atas segala bantuan yang telah di berikan kepada penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah wacana pemikiran bagi pihak yang berminat pada penelitian dibidang ini.

Yogyakarya, 28 Maret 2022

Penulis

Vinore Bitu Meja

MOTTO

Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah

(Lukas 18:27)

Tidak masalah berjalan lambat, asalkan anda tidak berhenti berusaha

(confucius)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Di tempat kelahiran saya, menempuh pendidikan dan meraih Gelar Sarjana merupakan sebuah keberhasilan yang sangat di syukuri. Secara pribadi, di tengah keterbatasan ekonomi dan ketertinggalan pengetahuan keluarga, dan dengan pencapaian ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya dan keluarga. Untuk itu dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Jhon Baka Ibi Roki dan Ibu Lidia Lubu Beba yang selalu memberikan dukungan, doa, arahan dan nasehat-nasehat.
2. Saudara-saudara saya, Yanti R. T. Rija, Juis K. Dungu, Obaja U. Sunga, Jekson Maki loja, Andini R. K. Dauki, Ince R. Karabu, Intan R.K. Regi, Devin U.D.D. Mayi, Adistya, dan saudara yang tak bisa di sebut satu persatu, yang selalu memberikan dukungan, Doa, dan selalu menjadi penyemangat hidup saya.
3. Keluarga besar saya yang tidak dapat disebut satu-satu, yang selalu memberikan dukungan doa, moril dan material.
4. Teman-Teman saya: Susana, Lerry Chandra, Riska Anggeli, Tri Wulandari Soba, Nurshamsiyah, Felinda Kusumawati, dan yang selalu ada dan membantu saya.
5. Dan teman- teman mahasiswa anggkatan 2018 yang tak di sebut namanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i

HALAMAN PENGESAHAN iii

LEMBARAN PERNYATAAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

MOTTO viii

HALAMAN PERSEMBAHAN ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR..... xv

INTISARI xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian..... 12

E. Kerangka Konseptual 12

1. Konsep Kapasitas 13

2. Pemerintah Desa 15

3. Sumber Air 25
4. Sistem Penyediaan Air Bersih 28
F. Fokus Penelitian 29
G. Metode Penelitian 30
1. Jenis Penelitian 30
2. Lokasi Penelitian 31
3. Unit Analisis 31
4. Teknik Pengumpulan Data 33
a. Observasi 33
b. Wawancara 35
c. Dokumentasi 35
d. Triangulasi 36
5. Teknik Analisis Data 36
a. Reduksi Data (*Data Reduction*) 37
b. Penyajian Data *(Data Display)* 38
c. Kesimpulan /Verifikasi *(conclustion Drawing/Verivicarion)* 38
BAB II PROFIL KALURAHAN WUKIRSARI
A. Keadaan Umum Kalurahan Wukirsari 39
B. Geografis Kalurahan Wukirsari 41
1. Letak Wilayah Kalurahan Wukirsari 41
2. Luas dan Penggunaan Lahan 42
C. Sumber Daya Alam 44
D. Demografi Kalurahan Wukirsari 45

E. Fasilitas Umum 50

1. Tempat Ibadah 50

2. Sekolah/Madrasah 50

3. Fasilitas Umum Lainnya 51

F. Pemerintah Kalurahan Wukirsari 52

1. Visi dan Misi Kalurahan Wukirsari 52

2. Struktur Organisasi 54

3. Deskripsi Ketersediaan Sumber Air di Kalurahan Wukirsari 57

BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Mewujudkan Aspirasi Masyarakat 62

2. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Jaringan Air Bersih 65

3. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Penyaluran Air Bersih Secara Seimbang Dan Merata 71

4. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dan Masyarakat Dalam Kerja Sama Dengan Pihak Luar 75

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 79

1. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Mewujudkan Aspirasi Masyarakat 79

2. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Jaringan Air Bersih 80
3. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Penyaluran Air Bersih Secara Seimbang Dan Merata 80
4. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dan Masyarakat Dalam Kerja Sama Dengan Pihak Luar 81

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan 27

Tabel 2.1 Lurah Yang Pernah Menjabat 33

Tabel 2.2 Penggunaan Lahan 36

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Padukuhan 39

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 40

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 41

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan 42

Tabel 2.7 Tempat Ibadah 43

Tabel 2.8 Sekolah/Madrasah 43

Tabel 2.9 Fasilitas Umum Lainnya 44

Tabel 2.10. Susunan perangkat Kalurahan 49

Tabel 2.11 Fasilitas Jaringan Air 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Kalurahan Wukirsari 53

INTISARI

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat pengaruh yaitu salah satunya dalam pembangunan desa, hal ini tentunya berkaitan dengan kapasitas dari berbagai kemampuan pemerintah desa dan masyrakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan pemerintah desa, maka kapasitas pemerintah kalurahan berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Kalurahan Wukirsari dalam penyediaan dan pengembangan jaringan air bersih. Dari hasil Observasi di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul mengalami kekurangan air bersih pada tahun 2018, lalu Pemerintah Kalurahan mendapatkan bantuan berupa sumur bor dari Pemerintah Daerah dan berbagai instansi-instansi terkait air. Namun, meskipun mendapatkan bantuan Kalurahan Wukirsari masih kekurangan air bersih. Maka peneliti ingin mengkaji melalui judul penelitian "kapasitas pemerintah kalurahan dalam penyediaan dan pengembangan jaringan air bersih di Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul".

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*, dan objek penelitian ini adalah kapasitas pemerintah kalurahan dalam penyediaan dan pengembangan jaringan air bersih, dan subjek penelitian ini terdiri dari Badan Permusyawarah Kalurahan (BPK), Lurah, perangkat Kalurahan, dan masyarakat. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 11 orang, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mendapatkan informasi yang tepat dan jelas. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian terkait kapasitas pemerintah kalurahan dalam penyediaan dan pengembangan jaringan air bersih di Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul menunjukan bahwa Pemerintah Kalurahan cukup memiliki kemampuan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Namun, kemampuan Pemerintah Kalurahan masih belum mampu menyediakan air bersih, mengembangkan jaringan air bersih penyaluran air bersih secara seimbang dan merata, dan kerjasama dengan pihak luar. Akan tetapi pemerintah kalurahan berupaya membangun rekasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan istansi-instansi tetrkait air.

Kata Kunci: Kapasitas, Pemerintah Kalurahan, Penyediaan Dan Pengembangan Air Bersih

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi ini, dapat dilihat bahwa kewenangan desa mendapat pengakuan terutama melalui asas rekognisi (pengakuan kewenangan berdasarkan hak asal-usul) dan subsidiaritas (pengakuan kewenangan lokal berskala desa) mandat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan dua sifat kewenagan desa, bersifat asal-usul dan lokal berskala desa, maka desa berhak untuk mengatur dan mengurus ururusan yang menjadi kewenagannya. Dengan demikian menjadi jelas dan tegas sekarang ini, bahwa desa memiliki kuasa dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus hal-hal tertentu yang menjadi kepentingan masyarakat desa. Pada Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak dan kekuasan yang dipunya untuk melakukan sesuatu, (www.kamusbahasaindonesia.org). Dalam buku Sukasmanto, Dina Mariana, (2015) Secara lugas juga bisa diartikan bahwa kewenangan itu hak untuk melakukan sesuai melalui kekuasaan dan tanggungjawab yang dilindungi oleh keabsahan hukum yang kuat, (Fathurrohman dan Sobri, 2002: 35; Sutoro Eko, 2014:16). Dalam konteks desa maka dapat dipahami bahwa kewenangan desa diartikan sebagai kekuasan dan tanggungjawab desa sebagai entitas hukum untuk mengatur dan mengurus desa.

Undang-Undang Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mempunyai kapasitas untuk mengatur dan mengurus pembangunan desa.

Kemampuan pemerintah dapat dilihat dari kapasitas pemerintah itu sendiri, kapasitas pemerintah desa berkaitan erat dengan dengan kinerja

pemerintah, karena berhasil atau tidaknya suatu kebijakan akan dinilai dari kinerja aparatur pemerintah pemerintah dengan komposisi kapasitas.

Kemampuan aparatur pemerintah adalah satu sektor penting dari pemerintah dalam menyediakan dan mengembangkan air bersih untuk pembangunan desa, hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk mampu bersikap responsif, akuntabel dan profesional dalam memberikan pelayanan salah satunya dalam pembanggunan jaringan air bersih.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air antara lain menyebutkan bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang layak dan memadai sehingga dapat memenuhi kehidupan manusia untuk dapat hidup sehat, bersih dan produktif. Mengingat betapa pentingnya air bersih untuk kebutuhan manusia, maka kualitas air tersebut harus memenuhi persyaratan (Peraturan Menteri Kesehatan No.416/PermenKes/IX/1990), yaitu salah satunya syarat fisik: air bersih, tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasah. Sehingga air tidak hanya dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari namun air bersih penting juga untuk kesehatan.

Air adalah salah satu unsur penting yang ada di bumi yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan semua jenis makhluk hidup, air tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga melainkan juga untuk kebutuhan-kebutuhan pertanian, dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan air bersih adalah jumlah air yang akan digunakan untuk keperluan pokok manusia dan kegiatan-

kegiatan yang memerlukan air, air sangat diperlukan untuk berbagai keperluan seperti dalam kehidupan sehari-hari dengan jumlah penggunaan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kehidupan sosial, ekonomi, dan kebiasaan masyarakat.

Kalurahan Wukirsari adalah Kalurahan yang terletak di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Kalurahan Wukirsari terdiri dari 16 Padukuhan antara lain; Singosaren, Bendo, Mangunan, Sindet, Tilaman, Pundung, Kedung Bueng, Karang Kulon, Giriloyo, Cengkehan, Nogosari satu, Nogosari Dua, Karangasem, Jitorejo, Karangtalun, dengan luas wilayah 1538,7 Ha dengan Jumlah Penduduk 17.213 jiwa dari 6.348 Kepala Keluarga. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang di lakukan dengan Lurah Wukirsari , Kalurahan Wukirsari mengalami kekeringan pada tahun 2017-2018 sehingga pada tahun itu banyak tangki-tangki air yang masuk di Kalurahan Wukirsari untuk mengantarkan air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Kalurahan Wukirsari hampir setiap warga memiliki sumur pribadi, meskipun memiliki sumur pribadi namun pada musim kemarau mengalami kekeringan karena sumur tidak terlalu dalam dan sebagian sumur terletak ditanah tandus sehingga tidak mampu menampung air dimusim kemarau. Kemudian pada tahun berjalan Pemerintah Kalurahan mendapat bantuan, bantuan tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan berbagai instansi-instansi penanggulangan kekeringan bencana yaitu dari Geologi, Badan Penanggulangan Bencana Kekeringan (BPBK), Program Nasional Penyediaan Air Minum (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Air Minum Desa

Bantul (AMD), Dinas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Pengelola Pemakaian Air (OPPA) dan berbagai bantuan dari instansi- intansi swasta. Namun walaupun mendapatkan berbagai bantuan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat masih terdapat beberapa Dukuh di Kaluharan yaitu di Padukuhan Karangasam, Padukuhan Dengkeng, Padukuhan Karangtalun, dan Padukuhan Nogosari II yang penyalurannya air bersih masih kurang atau tidak maksimal dan berpotensi mengalami kekeringan di musim kemarau. Berdasarkan permasalahan diatas maka pemerintah Kalurahan harus mempunyai kapasitas untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan cara menggembangkan fasilitas jaringan air bersih.

Berangkat dari narasi diatas Pentingnya kapasitas pemerintah desa ditunjukkan oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu: *Pertama,* penelitian yang dilakukan oleh Ade Christin Tyas Pratiwi, pada tahun 2019 yang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Kemuning Lor Kecamatan Anjasa Kabupaten Jember. Penelitian ini didasari oleh beberapa permasalahan di Desa Kemuning Lor terkait kapasitas pemerintah desa utamanya di bidang pengelolaan pembangunan. Penelitian ini Permasalahan tersebut meliputi ketidak sesuaian antara dokumen regulasi RKPDesa dan APBDesa, pelaksanaan pembangunan yang belum terealisasi 100 persen. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan di Desa Kemuningan Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jamber. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah kapasitas desa yang meliputi kapasitas responsif, ekstraksi, distributif,

responsif, dan jaringan. Sedangkan untuk standar pelaksanaan pembangunan desa menggunakan permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini terlengkapinya dokumen regulasi pelaksanaan pembangunan. Kapasitas distribusi berupa pembagian lokasi pembangunan dalam distribusi keuangan yang membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Responsif dari pemerintah desa berupa adanya respon penyelesaian permasalahan yang terjadi pada waktu pelaksanaan pembangunan 2017 berupa kerja sama dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya untuk melakukan pemeriksaan pembangunan 2016. Hasil tersebut menggambarkan jika kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa tahun 2017: kapasitas regulasi, ekstraksi, responsif, dan jaringan sudah terlaksana. Perbedaan dari penelitian tersebut adalah memiliki fokus penelitian dan rumusan masalah yang berbeda, dan memiliki persamaan yaitu meneliti tentang kapasitas Pemerintah Desa dan mengunakan metode penelitian yang sama.

Kedua, yang dilakukan Diar Budi Utama, Hendrawan Bayu Prewito, Hendro Pratikno, Yanuar Udianto Kurniadi, dan Hayatul Khairul Rahmat pada tahun 2020. Dengan judul Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam Pengurangan Risiko Bencana. kapasitas pemerintah desa dituntut untuk mampu merespon kebutuhan publik salah satu sektor yakni

kebencanaan. Dimana bencana merupakan kondisi peristiwa yang berada diluar kemampuan manusia yang menyebabkan kerugian jiwa maupun harta benda. Sehingga hal ini diperlukan sikap respon cepat dari stakeholders sebagai upaya kewajiban bersama salah satunya peran penting dari pemerintah desa. Jumlah kejadian bencana longsor di setiap kecamatan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2014-2016, Kecamatan Lumbir yang paling sering terjadi sebanyak 20 kali. Desa Dermaji merupakan desa yang paling sering dilanda bencana longsor di Kecamatan Lumbir tercatat sebanyak 8 kali dari tahun 2014-2016. Pentingnya penelitian kapasitas Pemerintah Desa dalam upaya pengurangan risiko bencana, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas dalam pengurangan risiko bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah mennggunakan metode penelitian kualitatif deskriftif. Hasil penelitian bahwa Pemerintah Desa Dermaji belum membentuk regulasi penanggulangan bencana sebagai upaya mitigasi sehingga perlu dirumuskan formulasi kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat desa dengan dukungan dan kesadaran dari masyarakat sebagai upaya legitimasi dan legalitas. Perbedaan dari penelitian tersebut adalah memiliki fokus penelitian dan rumusan masalah yang berbeda, dan memiliki persamaan yaitu meneliti tentang kapasitas Pemerintah Desa dan mengunakan metode penelitian yang sama.

ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rima Adhi Hapsari, Sudaryanti. pada tahun 2019 Dengan judul Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Ngimbrang

Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung) Otonomi desa memiliki salah satu tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum yang tercantum dalam undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Namun pada realitanya, kegiatan pelayanan administrasi kependudukan pada pemerintah desa ngimbrang belum berjalan secara optimal, hal tersebut disebabkan oleh masih terdapat aparat yang kurang paham dalam menggunakan komputer dan aplikasi pelayanan kependudukan, selain itu masih kurangnya kedisiplinan aparat dalam melaksanakan pekerjaannya. Maka, diperlukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi aparatur desa dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Dalam rangka membantu adaptasi dan proses dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem komputer ini, diperlukan adanya pengembangan kapasitas sdm aparat pemerintah desa ngimbrang dengan menggunakan model pengembangan kapasitas sdm grindle dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas sdm aparatur pemerintah desa ngimbrang dilakukan melalui 2 jenis kegiatan, yaitu pembimbingan teknis (bimtek) serta kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Tahapan tersebut sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah berpedoman pada regulasi yang ada dan selalu berkoordinasi dengan organisasi pemerintah daerah yang ada diatas pemerintah desa. Perbedaan dari penelitian tersebut adalah memiliki fokus penelitian dan rumusan masalah yang berbeda, dan memiliki

persamaan yaitu meneliti tentang kapasitas Pemerintah Desa dan mengunakan metode penelitian yang sama.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Haviz Lasmana pada tahun 2017 dengan judul Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa Panggak Laut dilihat dari tiga indikator yaitu, pemahaman, keterampilan dan kemampuan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat pemahaman, Aparatur Desa Panggak Laut sudah memahami mengenai penyusunan perencanaan pembangunan desa. Pada indikator keterampilan, Aparatur Desa Panggak Laut sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara terampil. Pada indikator kemampuan, Aparatur Desa Panggak Laut sudah mampu menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan harapan masyarakat dan mampu mengelola dana desa sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kapasitas Aparatur Desa,Panggak Laut dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aparatur Desa Panggak Laut sudah dibekali dengan pelatihan dan pendidikan yang menunjang terjadinya peningkatan kapasitas. Perbedaan dari penelitian tersebut adalah memiliki fokus penelitian dan rumusan masalah yang berbeda, dan memiliki persamaan yaitu meneliti tentang kapasitas Pemerintah Desa dan mengunakan metode penelitian yang sama.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Saukani 2014 dengan judul Upaya Pemerintah Desa Dalam Menyediakan Sumber Air Bersih Di Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Latar belakang penulisan ini mengenai upaya/strategi pemerintah desa dalam rangka menyediakan sumber air bersih di desa gunung intan kecamatan babulu kabupaten penajam paser utara. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptrif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa upaya pemerintah desa dalam penyedian air bersih terdiri dari perencanaan dalam penyediaan air bersih yang kurang berjalan dengan baik karena adanya kendala, pelaksanaan cara untuk menyediakan air bersih yang kurang baik karena tidak meratanya penyediaan air bersih, dan evaluasi/pengawasan penggunaan air bersih yang kurang berjalan dengan baik karena tidak rutinnya pemerintah desa dan stafnya untuk memantau penyediaan air bersih di Desa Gunung Intan. Hasil penelitian ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa gunung intan masih kurang berjalan dengan baik, pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gunung Intan masih tidak berjalan secara keseluruhan dan hanya bersifat sementara, dan pengawasan/evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa gunung intan cukup berjalan dengan baik dalam penyediaan air bersih tersebut. Perbedaan dari penelitian tersebut adalah memiliki fokus penelitian dan rumusan masalah yang berbeda, dan memiliki persamaan yaitu meneliti tentang penyediaan air bersih dan mengunakan metode penelitian yang sama.

Dari hasil penelitian diatas menunjukan bahwa kapasitas pemerintah sangat penting dan dibutuhkan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahterah dengan memberikan pelayanan yang baik.

Berdasarkan dari beberapa hasil reviuw dari penelitian-penelitian terdahulu diatas yang sudah meneliti terkait kapasitas Pemerintah Desa dan penyedian air bersih memiliki masalah yang berbeda, fokus penelitian penelitian yang berbeda, dan memiliki persamaan yaitu meneliti tentang kapasitas pemerintah desa, penyediaan air bersih, dan mengunakan metode penelitian yang sama.

Maka yang dilakukan selanjutnya oleh peneliti akan meneliti tentang Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Penyediaan dan Pengembangan Jarigan Air Bersih dengan fokus penelitian kapasitas pemerintah mewujudkan aspirasi masyarakat, kapasitas pemerintah dalam penyediaan dan pengembangan jaringan air bersih, kapasitas pemerintah dalam penyaluran air secara seimbang dan merata, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam kerja sama dengan pihak luar.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannyajawabanya melalui pengumpulan data. Dari latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah “Bagaimana Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam penyediaan dan pengembangan Jaringan air bersih di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam dan mendeskripsikan Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Penyediaan Dan Pengembangan Jaringan Air Bersih di Kalurahan Wukirsari Kapaneon Imogiri Kabupaten Bantul?.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

   Diharapkan memberikan wacana pemikiran khususnya dalam Kapasitas Pemerintah dalam Penyediaan Dan Pengembangan Jaringan Air Bersih.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi pembaca, dan masyarakat yang ingin meneliti lebih jauh tentang Kapasitas Pemerintah dalam Penyediaan Dan Pengembangan Jaringan Air Bersih.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini yang dimaksud peneliti dalam Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Penyediaan Dan Pengembangan Jaringan Air Bersih adalah kemampuan Pemerintah Kalurahan dalam menyediakan dan mengembangkan jaringan air bersdih untuk mengatasi atau mengurangi kekeringan terutama pada musim kemarau.

1. Konsep Kapasitas

Menurut Morgan dikutip dari (Lili Wulan Sari 2020) mendefinisikan bahwa kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumberdaya dan kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Kemudian Miller dikutip dari (Lili Wulan Sari 2020) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagai semestinya secara efektif, efisien dan terus menerus.

Menurut (Asrori, 2015) tugas utama yang harus dikembang pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, bahwa aparatur pemerintah desa harus memiliki kecakapan dan kapasitas yang transparan dan akuntabel Guna mewujudkan kesejahteraan tersebut, maka perlu didukung dengan kemampuan aparatur yang sesuai dengan harapan publik. Menurut Moenir (Lili Wulan Sari 2020) dalam kemampuan berasal dari kata mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang/jasa dengan yang diharapkan.

Menurut Rozaki (2005:213) kapasitas adalah sebuah konsep teknokratis, dan sudah lama di kenal dengan manejemen pemerintahan. Kapasitas sering dimengerti sebagai kemampuan seseorang individu, atau suatu suatu organisasi untuk melaksanakan sistem-sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan untuk untuk mencapai tujuaan tujuan secara efektif dan efisien.

Mengacu pada pengetian dan jenis kemampuan tersebut diatas, maka dalam suatu organisasi pemerintah desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesangupan, keterampilan, pengetahuan dalam tugas dan fungsi masing-masing secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahtraan.

Menurut Rozaki (2005) kapasitas pemerintah desa terdiri dari lima kapasitas yaitu:

1. Kapasitas regulasi adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat;
2. Kapasitas ekstraksi adalah kemampuan pemerintah desa dalam pengumpulan, mengerahkan, dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kehidupan pemerintah dan warga masyarakat;
3. Kapasitas distributif adalah kemampuan pemerintah desa dalam membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa;

4. Kapasitas responsif adalah kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dan perencanaan kebijakan pembangunan desa;
5. Kapasitas jaringan adalah kemampuan pemerintah dan warga masyarakat dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan.

2. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain atau yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Desa. sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan Wakil dari penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan memperdayakan masyaraakat Desa. Pada pasal 26 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. Menetapkan Peraturan Desa;
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

l. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas atau tanggung jawab dari seorang Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa yaitu:

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
g. Menaati dana menegakan seluruh peraturan perundang-undangan.
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
k. Mendamaikan perselisihanperselisian masyarakat desa.

l. Mengembangkan pendapat masyarakat desa.
m. Memanfaatkan teknologi guna;
n. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
o. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa.
p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
q. Melaksanakan wewenang lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Desa di atas, kepala desa berhak:

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. Menerima penghasilan tetap tiap bulan, tunjangan dan penerimaan yang lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d. Mendapatkan perlindungan hukum yang atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat di Desa tersebut. Masa jabatan

Kepala Desa adalah enam tahun (6 Tahun). Kepala desa dilantik oleh bupati/walikota, Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa; membina perekonomian desa, membina kehidupan masyarakat desa, Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat desa, mewakili desa baik di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang kedudukannya dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat Desa yaitu Sekretariat Desa, yang terdiri dari: Kepala Urusan Keuangan Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Pelaksanaan Kewilayaan terdiri dari: Kepala Dusun. Pelaksanaan Teknis terdiri dari: Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahtraan, Kepala Seksi Pelayanan.

1) Sekrataris Desa

Sekrataris Desa berkedudukan sebagai pimpinan Sekretariat Desa. Sekrataris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang admistrasi pemerintahan dalam.

Untuk melaksanakan tugas Sekrataris Desa mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan antara lain tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
b. Pelaksanaan urusan umum antara lain penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
c. Pelaksanaan urusan keuangan antara lain pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya; dan
d. Melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan antara lain menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2) Kepala Urusan

berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti:

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,

menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

3) Kepala seksi

berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Kepala Seksi mempunyai fungsi:

a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

4) Pelaksana Kewilayahan

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. Kepala Kewilayahan bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satunya pemerintah desa berwewenang dibidang pelaksanaan pembagunan desa terutama dalam penyediaan dan pengembangan air bersih.

Dari persfektif governabilitas, pemerintah desa dalam governabilitas berkaitan dengan kapasitas pemerintah. Dimana diperlukan pemerintah desa bukan hanya untuk memegang kekuasan semata, akan tetapi juga menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai kesejahtraan desa dan masyarakat desa. Salah satunya seperti meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan dan pengembangan jaringan air bersih bagi warga Kalurahan Wukirsari yang secara empirit memerlukan itu.

Menurut Sutoro Eko (dalam Jurnal Governabilitas Ilmu Pemerintahan Semesta 2021) governabilitas (otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah) adalah jantung *govermant making.* Kekuasaan menjadi pintu masuk pembicaraan. Pemegang kekuasaan bisa saja berhenti dengan *ruling* atau mempertahankan kekuasaan, bisa juga

mengunakan kekuasaan untuk *lending*, atau mengunakan otoritas secara rutin untuk menyelengarakan negara (*ordering the state*) semata. Kekuasan bisa membentuk *goverment making* ketika struktur-instusi berkerja secara dinamis melakukan, *transfarming the state* melalui pelembagan governabilitas. Ini terlihat bagaimana fungsi-fungsi pertama pemerintah melembaga dalam legislasi dan regulasi yang diciptakan oleh pemerintah-perlamen, sekaligus berkerjanya otoritas memaksa (koersi) terhadap negara, warga, dan masyarakat. Pelembagaan governabilitas melakukan kanalisasi hak dan kepentingan beragam subjek, sekaligus melakukan lititasi kekuasaanpolitik sehingga mengarakanya dan menjadi otoritas, kekuatan, kapasitas, kewajiban (responsibilitas), dan tanggungjawab (akuntabilitas).

3. Sumber Air

Menurut Sutrisno T (Yonesius Maarisit. 2016) air untuk keperluan sehari-hari dapat di peroleh dari macam-macam sumber diantaranya:

1) Air Permukaan

Air permukaan merupakan air hujan yang mengalir dipermukaan bumi, pada umumnya air air permukaan ini akan dapat pengotoran selama mengalir, setelah mengalami proses pengotoran yang pada suatu air permukaan akan mengalami proses pembersihan sendirinya, air permukaan terdiri dari dua macam yaitu:

a) Air Sungai

Dalam pengunaan sebagai air minum, perlu adanya suatu proses pengolahan yang sempurna mengigat bahwa air sungai pada umumnya mempunyai derajat pengotoran yang tinggi. Debit air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air bersih dapat mencukupi;

b) Air Rawa/Danau

Kebanyakan air rawa itu berwarna yang disebabkan oleh adanya zat Zatorganik yang telah membusuk, misalnya asam humas yang larut dalam air tersebut yang menyebabkan warna kuning dan coklat, dengan adanya pembusukan kadar zat yang tinggi maka pada umumnya kadar besi (Fe) dan mangan (Mn) dalam air akan tinggi, yang menyebabkan kelarutan oksigen (O2) dalam air berkurang, unsur-unsur Fedan Mn akan larut pada sinar matahari dan O2.

2) Air Tanah

Air tanah terdiri dari Air tanah dangkal, air tanah dalam dan air tanah dalam, dan mata air.

a) Air tanah dangkal

terjadi karena adanya proses dari permukaan tanah, lumpur akan bertahan demikian pula dengan sebagian bakteri sehingga air tanah akan jernih, tetapi tidak lebih banyak mengandung zat kimia (garam-garam) karena melalui lapisan

tanah yang mempunyai unsur kimia tertentu,disamping itu juga terjadi pengotoran dalam tanah selama peresapan terutama pada muka air yang dengan dengan mukatanah, setelah menemui lapiran rapat tanah, air akan terkumpul yang merupakan air tanah di manfaatkan untuk berbagai keperluan.

b) Air Tanah Dalam

Terdapat setelah lapiran rapat air tanah dangkal. Dalam hal ini harus digunakan bor dan memasukan pipa kedalamnya (biasanya antara 100-300meter) sehingga akan dapat suatu lapisan air. Jika tekanan air besar air akan menyembur keluar dan dalam keadaan ini, perlindungan mata air ini dapat disebut dengan perlindungan mata air artesis. Jika air tidak keluar dengan sendirinya maka digunakan pompa untuk membantu mengeluarkan air tanah dalam, ini lebih baik dari air tanah dangkal, karena penyaringannya lebih sempurna dan bebas dari bakteri, sedangkan kuantitas pada umumnya mencukupi dan sedit terpengaru pleh perubahan musim.

c) Mata Air

Mata air adalah air tanah yang akan keluar dengan sendirinya kepermukaan tanah. Mata air yang berasal dari mata air dalam hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kulalitasnya sama dengan air mata air dalam. Berdasarkan keluarnya (munculnya dari permukaan tanah) terbagi atas:

(1) Rembesan dimana air keluar lewat lereng-lereng;

(2) Timbul dimana air keluar dari permukaan suatu daratan;

(3) Air angkasa terdiri dari embun, salju, dan air hujan.

4. Sistem Penyediaan Air Bersih

Menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum pasal 1 ayat (6) dan ayat (7), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Irwan Wisnu Wardhana, dkk 2013) merupakan suatu kesatuan fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Sedangkan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembaganan, menajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Sistem penyediaan air bersih meliputi yang pertama sistem perpipaan sistem ini sebagai sarana sistem pendistribusian air, unit layanannya dapat mengunakan sambungan rumah, sambungan halaman, dan sambungan umum. Yang kedua sistem non-pipa sistem ini tidak mengunakan pipa sumur umum.

Penyediaan dan pengembangan jarigan air bersih merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang/sekelompok yang bertujuan untuk

membangun, dan/atau memperluas, jaringan air bersih dengan mengunakan sistem sambungan umum atau sistem perpipaan guna memenuhi kebutuhan air bersih untuk sehari-hari.

F. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih fokus tentang "Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Penyediaan dan Pengembangan Air Bersih (Studi Governabilitas Pemerintah Kalurahan Wukirsari Kapaneon Imogiri Kabupaten Bantul)" yaitu:

1. Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.
2. Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan jaringan air bersih.
3. Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam penyaluran air bersih secara seimbang dan merata.
4. Kapasitas Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam kerja sama dengan pihak luar.

G. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2020) Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono (2020) menyatakan bahwa cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu

dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejalah bersifat interaktif (reciprocal). Penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kualitatif adalah metode yang yang berlandasan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Maka peneliti akan memberikan gambarkan secara jelas mengenai kapasitas pemerintah desa dalam penyediaan dan pengembangan air bersih di Kalurahan Wukirsari Kapaneon Imogiri Kabupaten Bantul.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kalurahan Wukirsari, Kapaneon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Unit analisis

a. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kapasitas Pemerintah Kelurahan dalam penyediaan dan pengembangan air bersih.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan segala hal yang berkaitan dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dengan cara teknik *purposive* yaitu informan dipilih sesuai pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Informan

No	Nama	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Jenis Kelamin
1.	Sosilo Hapsoro, SE	46	Lurah	Laki-Laki
2.	Satriso, Mpd.	50	BPK	Laki-Laki
3.	Asnan Hidayat	39	Ulu-Ulu	Laki-Laki
4.	Dalmuji	50	Dukuh Nogosari I	Laki-Laki
5.	Hadi Prabowo	52	DukuhKarangasem	Laki-Laki
6.	Nur Sidiq	25	Dukuh Dengkeng	Laki-Laki
7.	Dewi Imawati	25	Dukuh Karangtalun	Perempuan
8.	Suparti	39	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
9.	Reni	33	Pedagang	Perempuan
10	Yunita	25	Buruh	Perempuan
11	Budiayanto wahyu	61	Petani	Laki-Laki

sumber: Data primer

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (dalam skripsiSapriono Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa. 2018) Teknik pengumpulan merupakan langkah yang strategis digunakan penelitian karena bertujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data, yang memenuhi standar data yang di tetapkan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dan triagulasi.

a. Observasi

Salah satu teknik yang digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik

observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar dari perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di dalam untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Dari hasil observasi di Kalurahan Wukirsari di Padukuhan Karangasem terdapat 1 unit sumur bor yang diletakan di tempat yang tinggi (dataran tinggi), namun tidak dapat di gunakan oleh semua warga di Padukuhan tersebut karena rumah warga terlalu jauh dari sumur bor. Di Padukuhan Karangasem terdapat satu RT yang itu RT 03 yang jauh atau tidak dapat terjangakau penyaluran air dari sumur bor, warga RT 03 berusaha membuat sumur galian dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kalurahan yang berupa mesin penyedot, pipa, dan penampung air. Warga di Padukuhan Karangasem memiliki sumur pribadi akan tetapi mengalami kekeringan di musim kemarau.

Di Padukuhan Karangtalun terdapat 4 unit sumur bor. Namun 4 unit sumur ini tidak dapat digunakan oleh semua warga Padukuhan Karangtalun kebanyakan rumah warga di tempat yang cukup tinggi dan susah untuk mendapatkan penyaluran karena biaya yang cukup besar. Dan di Padukuhan Karngtalun juga terdapat satu RT yang berada di dataran yang cukup tinggi yaitu RT 04. RT 04 ini mengusahakan membuat sumur

galian yang kemudian mendapat bantuan dari Pemerintah Kalurahan berupa alat penyedot air, pipa dan penampungan air.

Di Padukuhan Dengkeng hanya terdapat 1 unit sumur bor, sumur tersebut tidak dapat di gunakan oleh semua warga di Padukuhan Dengkeng karena hampir sebagian warga bertempat tinggal didataran yang cukup tinggi, dan warga sebagian menggunakan air dari Dukuh tetangga, sumur pribadi milik warga Dukuh Dengkeng sebagian sudah tidak digunakan karena tidak ada air atau mengalami kekeringan.

Dan di Padukuhan Nogosari II terdapat 2 unit sumur bor. Namun, penyaluran sumur bor di Dukuh Nogosari II ini tidak maksimal (pengunaannya belum 1x24 jam), dan tiap rumah bergiliran dalam mengunakan air. Dan kondisi sumur warga di Dukuh Nogosari II sudah kering karena tanah tandus.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Esterberg (dalam skripsi Sapriono Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa. 2018) interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanyajawab, sehingga dapat di kontribusikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dari penegrtian diatas peneliti menyimpulkan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang

diwawancarai (interview) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (Menurut Sugiyono (dalam skripsiSapriono Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa. 2018). dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu yang berbentuk tulisan, foto, monumrntal seseorang. Dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Objek penelitian ini dokumentasi sebagai pendukung mengenai hasil penelitian dari observasi dan wawancara agar semakin akurat dan dipercaya. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data dari dokumen dan arsip yang terdapat di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan APBDesa Kalurahan Wukirsari.

d. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2020; 315) dalam teknik pengumpulan data triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data yang telah ada.

Triangulasi teknik, berarti peneliti mengunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan hasil sumber yang sama. Peneliti mengunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi teknik berarti,

untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Menurut Sugiyono (2016;335) analisis interaktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori dan menjabarkan dalam unit-unit serta menyusun, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Definisi tersebut dapat disimpulkan langkah pertama dalam menganalisis data dengan mengumpulkan data kemudian menyusun secara sistematis dan menarik kesimpulan dari hari analisis, setelah itu mempresentasikan hasil penelitian.

Penelitian kualitatif dalam menganalisis data difokuskan pada pendeskripsian yang terperinci mengenai interaksi, perilaku dan peristiwa selama proses di lapangan yang bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara pernyataan seseorang tentang pengalaman kemudian melakukan analisis. Dalam penelitian ini ada tiga model analisis data yang digunakan untuk penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 2018;137).

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah bentuk analisis data yang mengarahkan, merangkum, menggolongkan tema dan membuang yang tidak perlu sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat ditarik dan diverifikasi dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya yang akan diperlukan pada saat menganalisis data.

Analis data penelitian ini melalui wawancara dengan informan, setelah melakukan wawancara kemudian menganalisis dengan membuat transkip atau hasil wawancara dengan menuliskan kembali hasil dari wawancara, kemudian dijadikan reduksi data yaitu mencatat dan mengambil inti dari informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dalam berbagai cara diantaranya: ringkasan uraian, menggolongkan dan menyeleksi.

b. Penyajian Data (Data Display)

Tahap penyajian data dengan menyusun data yang relevan dan mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan telah disusun secara sistematis, sehingga dapat disimpulkan atau makna penelitian yang dapat dilakukan dengan membuat hubungkan fenomena yang terjadi, dan perencanaan selanjutnya, tujuannya untuk mengetahui permasalahan yang perlu ditindak lanjuti atau tidak dan menganalisis kevalidan berdasarkan data yang diperoleh.

c. Kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/ verification)

Kesimpulan adalah tinjauan ulang atau kesimpulan yang timbul dari data setelah diuji kebenarannya. Penarikan kesimpulan data dan verifikasi atau jawaban dari rumusan masalah dalam analisis kualitatif yang bersifat sementara dan akan berkembang atau berubah apabila ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada pengumpulan data.

BAB II

PROFIL KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

A. Keadaan Umum Kalurahan Wukirsari

1. Sejarah Kalurahan Wukirsari

Kalurahan Wukirsari menurut warga masyarakat terdahulu berasal dari kata “Wukir” yang berarti gunung dan “Sari” berarti bagus/baik. Jadi, secara harafiah Wukirsari dapat diartikan sebagai wilayah pegunungan yang baik. Kalurahan Wukirsari pada awalnya merupakan gabungan dari empat Kalurahan, yaitu Kalurahan Giriloyo, Kalurahan Pucung, Kalurahan Pajimatan, dan Kalurahan Singosaren. Pada tahun 1946, keempat Kalurahan tersebut bergabung menjadi satu Kalurahan, atau sebelumnya dikenal dengan sebutan “Catur Manunggal Mukti” yang kini dikenal dengan Kalurahan Wukirsari.

Adapun Kalurahan Wukirsari dibagi menjadi 16 padukuhan yaitu :

1. Padukuhan Singosaren,
2. Padukuhan Sindet,
3. Padukuhan Manggung,
4. Padukuhan Bendo,
5. Padukuhan Tilaman,
6. Padukuhan Pundung,
7. Padukuhan Kedunguweng,
8. Padukuhan Karangkulon,
9. Padukuhan Giriloyo,

10. Padukuhan Cengkehan,

11. Padukuhan Nogosari I,

12. Padukuhan Nogosari II,

13. Padukuhan Karangasem,

14. Padukuhan Jatirejo,

15. Padukuhan Dengkeng dan,

16. Padukuhan Karangtalun.

Lurah yang pernah menjabat semenjak berdirinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Lurah yang pernah menjabat.
Sumber: RPJMDesa 2018.

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Marjono/Notowisastro	Periode tahun....s/d...	Lurah pertama
2.	Sastrosuwito	Periode tahun...s/d 1982	Lurah kedua
3.	R. Harsoyo	Periode tahun 1982 s/d 1995	Lurah ketiga
4.	Sujiyono	Periode tahun 1997 s/d 2004	Lurah keempat
5.	Bayu Bintoro, S.E	Periode tahun 2004 s/d 2014	Lurah kelima
6.	Bayu Bintoro, S.E	Periode tahun 2016 s/d 2017	Lurah keenam
7.	Susilo Hapsoro, S.E	Periode tahun 2018 s/d 2024	Lurah ketujuh

Dilihat dari tabel diatas bahwa Kalurahan Wukirsari terbentuk pada tahun 1982, pemerintah Kalurahan Wukirsari telah mengalami pergantian periode sebanyak tujuh kali, sehingga sekarang di pimpin oleh Susilo Hapsoro, S.E Periode tahun 2018 s/d 2024.

B. Geografis Kalurahan Wukirsari

1. Letak Wilayah Kalurahan Wukirsari

Kalurahan Wukirsari terletak 16 km di sebelah selatan Kota Yogyakarta dengan Kantor/ Balai Kalurahan yang terletak di dusun Nogosari I. Luas wilayah Kalurahan Wukirsari berkisar kurang lebih 1538,7 Ha yang terdiri dari 101 RT dan 16 dusun, yaitu Bendo, Cengkehan, Dengkeng, Giriloyo, Jatirejo, Karangasem, Karangkulon, Karangtalun, Kedungbuweng, Manggung, Nogosari I, Nogosari II, Pundung, Sindet, Singosaren, dan Tilaman. Jarak dari Kalurahan ke Kecamatan Imogiri sejauh 3 Km. Jarak dari Kalurahan ke pemerintahan kota sejauh 9 Km. Jarak Kalurahan ke pemerintahan kota sejauh 10 Km dan jarak Kalurahan ke Ibukota Provinsi sejauh 17 Km. Adapun batas Kalurahan Wukirsari adalah sebagai berikut:

Dengan batas wilayah Kalurahan Wukirsari adalah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara : Kapanewon Jetis dan Kapanewon Pleret
2. Sebelah Timur : Kapanewon Dlingo
3. Sebelah Selatan : Kalurahan Imogiri, Kalurahan Girirejo, dan Kapanewon Dlingo
4. Sebelah Barat : sungai Opak dan Kapanewon Jetis

Dari batas wilaya yang dijelaskan diatas maka dapat dikatakan bahwa Kalurahan Wukirsari berada di tiga Kapanewon, 2 kalurahan dan satu sungai yakni Kapanewon Jetis, Kapanewon Pleret, Kapanewon Dlingo. Sedangkan dua Kalurahan dan sungai yaitu Kalurahan Imogiri, Kalurahan Girirejo dan sungai Opak

Orbitas (Jarak dari Pusat Kepemerintahan):

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 3 Km
2. Jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten : 10 Km
3. Jarak Ibu Kota Provinsi : 17 Km

Gambar 2.1. Peta Kalurahan Wukirsari

Sumber: RPJMDesa 2018

2. Luas dan Pengunaan Lahan

Luas wilayah keseluruhan Kalurahan Wukirsari adalah 1538,7 Ha yang terdiri dari 101 RT dan 16 dusun, Yaitu Bendo ,Cengkehan ,Dengkeng, Giriloyo, Jatirejo, Karangasem, Karangkulon, Karangtalun, Kedungbuweng, Manggung, Nogosari 1, Nogosari 2, Pungguk, Sindet, Singosaren dan Tilaman. Dari luas wilayah tanah yang terdapat di Kalurahan Wukirsari maka dapat dibagi menurut status, penggunaan melalui tabel berikut:

Tabel 2.2 Pengunaan Lahan

No	Penggunaan lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	Lahan persawahan/pertanian	307.7 Ha	19.99
2	Ladang/ Tegalan	192.3 Ha	12.49
3	Perkebunan	102.6 Ha	6.67
4	Pemukiman	860.7 Ha	55.94
5	Perdagangan dan Jasa	38.5 Ha	2.51
6	Hutan	26.0 Ha	1.69
7	Lain-lain	10.9	0.71
JUMLAH		**1538.7 Ha**	**100**

Sumber: Profil Kalurahan Wukirsari 2019

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, dapat diketahui bahwa luas wilayah Kalurahan Wukirsari secara keseluruhan adalah 1538,9 Ha. Luas tersebut di bagi kedalam beberapa karakteristik yaitu pengunaan lahan. Penggunaan lahan paling banyak adalah pemukiman yang presentasenya 55,94%, pengunaan pemukiman di Kalurahan Wukirsari adalah pemukiman digunakan sebagai perumahan, sebagian lahan di dekat perumahan dipenuhi dengan pohon jati, mahoni, dan sebagian digunakan juga sebagai kebun untuk sayur-sayuran, jagung, kacang-kacangan dan tanaman lainnya. Kemudian pengunaan lahan disusul oleh pengunaan lahan sebagai lahan perwasahan/pertanian dengan presentase 19,99%.

C. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang terdapat di Kalurahan Wukirsari adalah lahan persawahan, lahan tegalan, tanah pekarangan, tanah pemukiman, dan sumber air.

1. Persawahan.

   Sumber daya alam yang terdapat di Kalurahan Wukirsari sebagian besar adalah pertanian yang menempati kawasan wilayah 2/3 terbagi menjadi 1/3 dataran rendah seperti di dusun Sindet, Singosaren, Manggung, Bendo, Tilaman dan Pundung, sedangkan untuk dusun lainnya telah tersebar di dataran-dataran tinggi.

   Tekstur tanah dikawasan Wukirsari pada umumnya adalah tanah yang subur, terutama tanah pertaniannya. Namun kesuburan tanah tersebut belum dapat dimaksimalkan karena persoalan aliran irigasi yang kurang memadai, sehinga lahan persawahan yang membentang dari Manggung sampai Nogosari dan Pucung hanya mampu panen dua kali dalam setahun. Lebih dari itu areah persawahan di kawasan Nogosari Plencing dan sindet bahkan hanya mampu setahun sekali, karena pengairannya adalah tadah hujan.

2. Lahan Tegalan.

   Lahan tegalan adalah lahan kering yang ditanami tanaman semusiman atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah. Lahan tegalan di Kalurahan Wukirsari digunakan sebagai lahan perkebunan yang ditanami padi, jagung, cabai, dan sayur-sayuran.

3. Tanah Pekarangan.

Tanah pekarangan adalah lahan terbuka yang ada disekitar rumah. Tanah pekarangan di Kalurahan Wukirsari dimanfaatkan untuk menanami singkong, pisang, pepaya, dan tanaman bumbu rempah.

4. Tanah Pemukiman.

Tanah pemukiman adalah kawasan yang digunakan untuk tempat tinggal. Pemukiman di Kalurahan Wukirsari selain untuk rumah, pemukiman juga digunakan sebagai lahan unit usaha *home Industri* yaitu pembuatan genteng, batik, sangkar burung, kerajinan bambu, kerajinan wayang,kerajinan tas kulit, meubel, rajut, sablon, roti, penjahit, dan unit usaha lainnya. Kemudian digunakan juga untuk, toko/kios/ warung, dan bengkel.

5. Sumber air

Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh mahluk hidup. Di Kalurahan Wukirsari terdapat 3817 sumber air yang berupa sumur galian. Namun, pada musim kemarau sumber air tersebut mengalami kekeringan.

D. Demografi Kalurahan Wukirsari

Kalurahan wukirsari memiliki jumlah penduduk sebanyak 17.213 jiwa dari 6. 348 jiwa Kepala Keluarga pada tahun 2019, dengan kepadatan penduduk 1,12 jiwa/km. Jumlah penduduk ini meliputi penduduk menurut Padukuhan, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.

1. Jumlah Penduduk Menurut Padukuhan

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Padukuhan

No	Dukuh	Jumlah	presentase (%)
1	Singosaren	1.150	6.68
2	Bendo	1.196	6.95
3	Maggunan	1.089	6.33
4	Sindet	1.212	7.04
5	Tilaman	459	2.66
6	Pundung	460	2.67
7	Kedungbweng	560	3.25
8	Karangkulon	1.055	6.13
9	Giriloyo	667	3.87
10	Cengkehan	846	4.91
11	Nogosari I	1.118	6.49
12	Nogosari II	1.779	10.34
13	Karangasem	1.334	7.75
14	Jatirejo	1.429	8.31
15	Karangtalun	1.703	9.89
16	Dengkeng	1.156	6.72
	Jumlah	**17.213**	**100**

Sumber: Profil Kalurahan Wukirsari Tahun 2019

Dilihat dari tabel 2.3 diatas jumlah penduduk menurut Padukuhan di Kalurahan Wukirsari jumlah penduduk terbesar ada di Padukuhan Nogosari II dengan jumlah 1.779 jiwa atau sebesar 10,34%, kemudian disusul jumlah penduduk paling banyak yaitu Padukuhan Karangtalun dengan jumlah 1.703 jiwa atau sebesar 9.89%. Dengan jumlah penduduk yang banyak di Padukuhan Nogosari II dan di Padukuhan Karangtalun berarti pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat dengan menyediaan dan mengembangkan air bersih di Kalurahan Wukirsari.

2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	**Jenis Kelamin**	**Jumlah**	**Presentase (%)**
1	Perempuan	8.852 jiwa	51.43
2	Laki-Laki	8.361 jiwa	48.57
Jumlah		17.213 jiwa	100

Sumber: Profil Kalurahan Wukirsari Tahun 2019

Dari data di atas jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kalurahan Wukirsari penduduk didominasi oleh perempuan dengan presentase 51.43%. sedangkan laki-laki berjumlah presentase 48.57%.

3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	presentase %
1	Lulusan SD/ Sederajat	3.258	18.93
2	Lulusan SMP / Sederajat	1.821	10.58
3	Lulusan SMA / Sederajat	2.026	11.77
4	Lulusan Diploma	187	1.08
5	S1	397	2.31
6	S2	24	0.14
7	S3	4	0.03
8	Lulusan Pondok Pesantren	150	0.87
9	Tidak sekolah	9.346	54.29
Jumlah		**17.213 jiwa**	**100**

Sumber: Profil Kalurahan Wukirsari Tahun 2019

Dari tabel diatas 2.5 dapat lihat bahwa tingkat di Kalurahan Wukirsari cukup produktif. Meskipun presentase yang belum mengenyam pendidikan lebih tinggi, akan tetapi dapat dilihat di tabel diatas di Kalurahan Wukirsari sudah cukup banyak yang mengenyam pendidikan di Perguruan tinggi.

4. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	presentase (%)
1	LINMAS	76	1.29
2	Petani	1.344	22.82
3	PNS	233	3.96
4	TNI/ POLRI	57	0.97
5	Pengerajin	829	14.08
6	Pedagang	1.133	19.24
7	Swasta	1.261	21.42
8	Dokter/ Perawat/ Bidan	46	0.78
9	Tukang (pengerajin)	730	12.40
10	Jenis Pekerjaan Lainnya (Buruh, Ibu Rumah Tangga, Perangkat Kalurahan, Dosen.)	179	3.04
JUMLAH		5.887	100

Sumber: Profil Kalurahan Wukirsari Tahun 2019

Dari tabel 2.6 diatas dapat dilihat bahwa di Kalurahan Wukirsari memiliki pekerjaan yang cukup varian, pekerjaan masyarakat di Kalurahan Wukirsari masih berkerja disektor pertanian dengan

presentase 22.82%. kemudian di susul pekerjaan pedagang dengan presentase 19.24%.

E. Fasilitas Umum

1. Tempat Ibadah

Tabel 2.7 Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Unit
1	Mushola	92
2	Masjid	37
3	Gereja	1
Jumlah		**130**

Sumber : Profil Kalurahan Wukirsari 2019

Dari tabel 2.7 diatas di Kalurahan Wukirsari tempat ibadah diKalurahan Wukirsari sebanyak 130 unit. Dari tabel tempat ibadah diatas, masyarakat Wukirsari mayoritas beragama muslim dengan tempat ibadah 129 unit, sedangkan gereja 1 unit.

2. Sekolah/ Madrasah

Tabel 2.8 Sekolah/ Madrasah

No	Jenis	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12
2	Madrasah Diniyah	2
3	Taman Kanak-kanak (TK)	4
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2
5	Sekolah Dasar (SD)	4
6	Madrasah Tsawiyah (MTs)	1
7	SMA	1
8	MAK	1
Jumlah		27

Sumber : Profil Kalurahan Wukirsari 2019

Dari tabel 2.8 diatas sekolah/madrasah yang ada di Wukirsari ada 27 unit dan yang paling banyak adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jumlah 12 unit. Fasiltas sekolah di Kalurahan Wukirsari cukup baik.

3. Fasilitas Umum Lainnya

Tabel 2.9 fasilitas umum lainnya

No	Jenis	Unit
1	Balai Pertemuan	14
2	Makam	33
3	Pos Ronda	102
4	Sarana Olaraga	41
5	Pasar	22
6	Tempat Pembuangan Sampah Umum	12
7	Prasarana Kesehatan	15
8	Lembaga Keuangan	13
Jumlah		252

Sumber : Profil Kalurahan Wukirsari 2019

Pada tabel 2.9 diatas fasilitas umum lainnya yang ada di Kalurahan Wukirsari ada 252 unit fasilitas yaitu Balai Pertemuan, Pos Ronda, Sarana Olaraga, Lembaga Keuangan, Prasarana Kesehatan, Tempat Pembuangan Sampah Umum, Pasar, dan Makam.

F. Pemerintah Kalurahan Wukirsari

1. Visi dan Misi Kalurahan Wukirsari

   1) Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Wukirsari harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refeksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Kepala Kalurahan/ Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun ke depan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Kepala Kalurahan/ Lurah. Adapun Visi Kepala Lurah Kalurahan Wukirsari periode 2018-2024 (Susilo Hapsoro, SE.) adalah sebagai berikut

"WUKIRSARI SEJAHTERA & MENDUNIA"

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan

kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakikat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kalurahan selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Kepala Lurah Kalurahan Wukirsari seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Wukirsari sebagai berikut.

- Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, amanah dan terbuka berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- Mendorong berkembangnya kualitas sumber daya manusia Kalurahan Wukirsari yang dilandasi nilai nilai agama dan nilai nilai luhur budaya (saling asih, saling asah dan saling asuh) untuk mewujudkan

masyarakat yang maju dan modern dengan landasan moral agama yang punya kepedulian terhadap lingkungan.

- Peningkatan sarana dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan publik dengan slogan; senyum, cepat dan tepat.
- Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- Memberdayakan potensi lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.
- Memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.
- Mewujudkan lingkungan yang bersih aman, tertib dan nyaman.

2. Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kalurahan Wukirsari adalah sebgai berikut:

1) Lurah
2) Carik
3) Kepala Urusan Tata Laksana;
4) Kepala Urusan Danarta;
5) Kepala Urusan Pangripta;
6) Jagabaya;
7) Ulu-Ulu;
8) Kamituwa.

9) Dukuh.

Stuktur Pemerintah Kalurahan Wukirsari

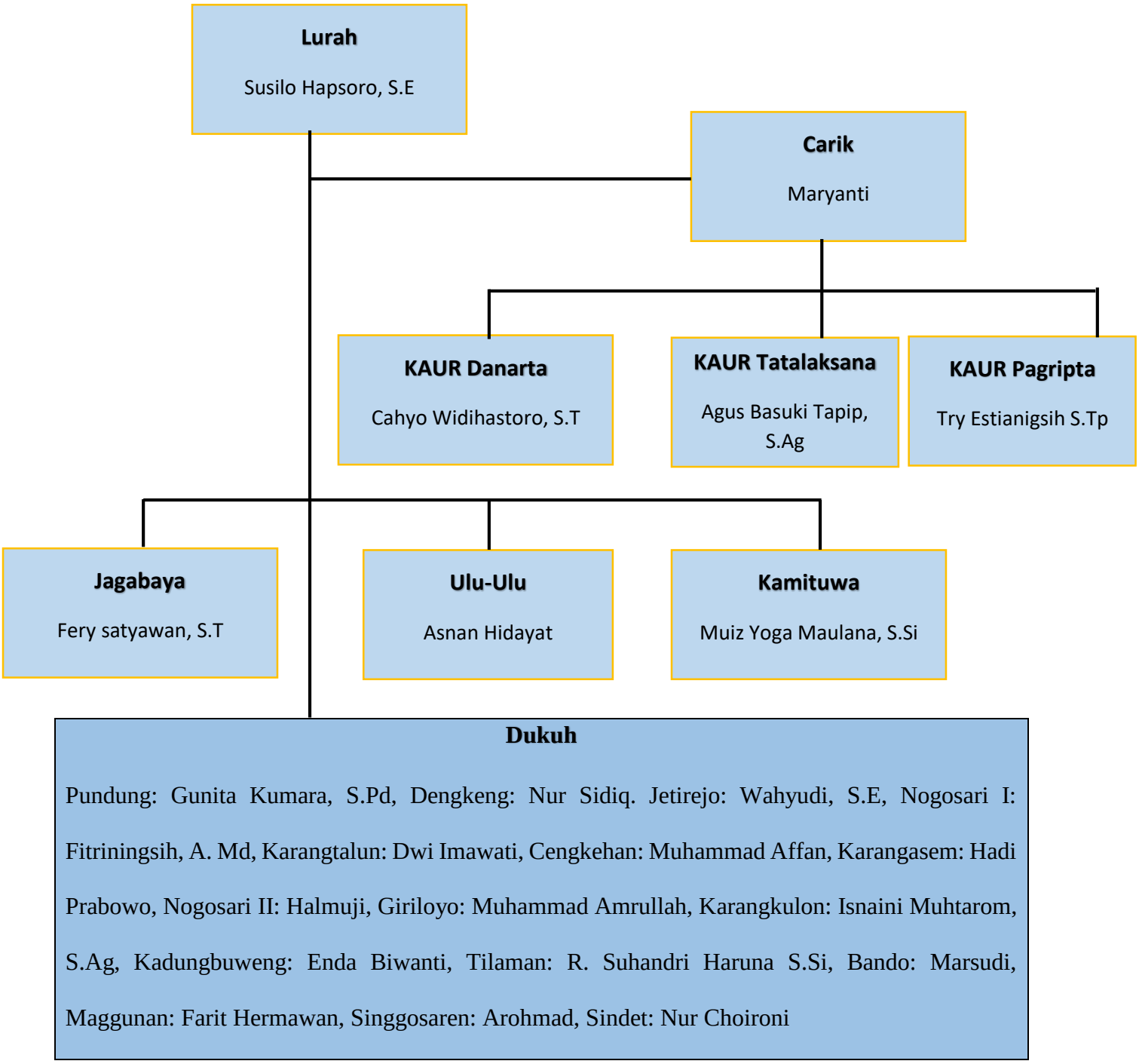

Susunan perangkat Kalurahan dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.10. Susunan perangkat Kalurahan.

No	Nama	Jabatan
1	Susilo Hapsoro, S.E	Lurah
2	Maryanti	Carik
3	Fery Satyawan,S.T.	Jagabaya
4	Asnan Hidayat	Ulu-Ulu
5	Muiz Yoga Maulana	Kamituwa
6	Cahyo Widihastoro, S.T	Kepala Urusan Danarta
7	Agus Basuki Tapip, S.Ag.	Kepala Urusan Tatalaksana
8	Tri Estiningsih, S.TP	Kepala Urusan Pagripta
9	Arohmad	Dukuh Singosaren
10	Marsudi	Dukuh Bendo
11	Farit Hermawan	Dukuh Manggung
12	Nur Choironi	Dukuh Sindet
13	R.Suhandri Haruna, S.Si	Dukuh Tilaman
14	Waljiyana	Dukuh Pundung
15	Endah Biwanti	Dukuh Kadungbuweng
16	Isnaini Muhtarom, S.Ag.	Dukuh Karangkulon
17	Muhammad Amrullah	Dukuh Giriloyo
18	Muhammad Affan	Dukuh Cengkehan
19	Fitri Ningsih, A.Md	Dukuh Nogosari I

20	Dalmuji	Dukuh Nogosari II
21	Hadi Prabowo/Wagiman	Dukuh Karangasem
22	Purwono Dwi Nugroho	Dukuh Jatirejo
23	Dewi Imawati	Dukuh KarangTalun
24	Saromi/Sarjito	Dukuh Dengkeng

Sumber: Profil Kalurahan Wukirsari Tahun 2019

Dilihat dari 2.10 diatas bahwa Pemerintah Kalurahan dengan jumlah keseluruhan sebnyak 24 orang.

G. Deskripsi Ketersediaan Sumber Air di Kalurahan Wukirsari

Pada musim kemarau masyarakat Wukirsari memenuhi kebutuhan air bersih untuk sehari-hari dengan mengambil air di sungai pada saat itu tahun 2018 Masyarakat Kalurahan Wukirsari mengalami kekeringan kemudian masyarakat Kalurahan Wukirsari mendapatkan bantuan dari penangulangan bencana kekeringan yaitu penggelolaan Air Bersih Tinggkat Kalurahan (PAB) yang berupa 2 Sumur Bor yang di tempatkan di dua Padukuh, karena masih banyak masyarakat yang belum terjangkau jaringan penyeluran air bersih dan terdapat beberepa kendala dimana perawatan prasarana penyaluraan air bersih tidak terawat karena kurangnya kerja sama masyarakat setempat kemudian pemerintah Kalurahan Wukirsari mengembangkan sumur bor.

Fasilitas jaringan air bersih yang ada di Kalurahan Wukirsari sebagai berikut:

1. Fasilitas jaringan air

Tabel 2.11 Fasilitas Jaringan Air.

No	**Dusun**	**Fasilitas Penggunaan Air**		
		Sumur Galian	**Sumur Bor**	**Mata Air**
1	Singgosaren	261	-	-
2	Bendo	240	-	-
3	Manggung	217	-	-
4	Sindet	239	-	-
5	Taliman	132	-	-
6	Pundung	145	-	-
7	Kwdungbuweng	119	-	-
8	Karang kulon	210	-	-
9	Giriloyo	171	-	1
10	Cengkehan	223	-	-
11	Nogosari I	264	-	-
12	Nogosari II	394	2	-
13	Karangasem	311	1	1
14	Jatirejo	309	-	1
15	Karangtalun	343	4	-
16	Dengkeng	239	1	-
Jumlah		**3817**	**8**	**3**

Sumber: Profil Kalurahan Wukirsari Tahun 2019

Dari tabel 2.11 diatas fasilitas jaringan air bersih yang ada di Kalurahan Wukirsari:, sumur galian 3817 unit adapun sumur galian ini sebagian sumur galian adalah sumur pribadi milik waga, namun pada musim kemarau panjang air dalam sumur galian tidak dapat digunakan dan mengalami kekeringan, sumur bor 8 unit sumur bor yang diada di Kalurahan wukirsari adalah bantuan dari instansi-instansi terkait, dan mata air 3.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Kapasitas Pemerintah Kalurahan Wukirsari Dalam Penyediaan Dan Pengembangan Jaringan Air Bersih Di Kalurahan Wukirsari, Kapanweon Imogiri, Kabupaten Bantul. Jadi diperoleh kesimpulan mengenai Kapasitas Pemerintah Kalurahan Wukirsari Dalam Penyediaan Dan Pengembangan Jaringan Air Bersih dimana yang Pemerintah Kalurahan lakukan sudah mewujudkan aspirasi masyarakat, penyediaan dan pengembangan air bersih, penyaluran air bersih secara seimbang dan merata, dan kerja sama Pemerintah Kalurahan, dan masyarakat dengan pihak luar.

1. Kapasitas pemerintah kalurahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat

Pemerintah Kalurahan sudah cukup baik dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dimana Pemerintah Kalurahan berupaya kerjasama meminta bantuan di berbagai instansi-instansi yang berhubungan dengan air bersih dan mendapatkan berbagai bantuan yang berupa bantuan sumur bor, mesin penyedot air, toring (penampung air), pipa, dan meteran listrik. Dan penyediaan air bersih mampu digunakan hingga pada saat ini.

2. **Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan jaringan Air Bersih**

Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam pengembangan jaringan air bersih, Pemerintah Kalurahan belum mampu menyediakan dan mengembangkan jaringan air bersih, akan tetapi pemerintah Kalurahan berusaha membagun kerjasama dengan dengan instansi-instansi terkait air. Sehingga pada saat ini di beberapa Padukuhan dimana penambahan jaringan dilakukan di Padukuhan Karangtalun dengan penambahan jaringan air bersih berupa 3 unit sumur bor, lalu di Padukuhan Karangasem Pemerintah Kalurahan menambahkan jaringan air bersih berupa 1 Unit sumur bor, kemudian di Padukuhan Dengkeng Pemerintah kalurahan mengadakan Penambahan jaringan air bersih berupa 1 unit sumur bor, namun saat ini di Padukuhan Nogosari II belum ada penambahan jaringan air bersih.

3. **Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Penyaluran Air Bersih Secara Seimbang Dan Merata**

Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Penyaluran Air Bersih Secara Seimbang Dan merata. Pemerintah sudah melakukan penyaluran secara merata di Padukuhan Karangtalun. Namun, penyalurannya di Dukuh Karangasem, Dengkeng, Nogosari II belum merata dimana di Padukan Karangasem 1 unit Sumur bor hanya mampu digunakan oleh 80 KK sedangkan di Padukuhan Karangasem ada 438 KK, kemudiaan di Padukuhan Nogosari II penyalurannya dan pengunaan airnya belum

maksimal, dan di Padukuhan Dengkeng penyaluraan air bersihnya belum merata karena ada rumah warga yang diatas pemukiman dan susah untuk menyambung air dari sumur bor.

4. Kapasitas Kerjasama Pemerintah Kalurahan Dan Masyarakat Dengan Pihak Luar

Kapasitas Kerjasama Pemerintah Kalurahan Dan Masyarakat Dengan Pihak Luar. Pemerintah Kalurahan belum ada kerja sama yang berkesinambungan dengan pihak luar dimana kerja sama Pemerintah Kalurahan bersifat temporer. Akan tetapi Pemerintah Kalurahan hanya menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya serta dengan menarik kesimpulan dari hasil yang diteliti oleh peneliti, ada beberapa saran yang di sampaikan oleh peneliti, ada pun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kalurahan, diharapkan untuk lebih memaksimal atau mengoptimalkan penyediaan dan pengembangan jaringan air bersih agar peyaluran air bersih merata untuk kehidupan masyarakat Kalurahan Wukirsari.
2. Bagi Pemerintah Kalurahan, diharapkan untuk mempunyai kerja sama yang berkesinambungan dengan pihak-pihak luar terkait air bersih untuk pengembangan jaringan air bersih.

3. Bagi masyarakat semoga sumur bor yang disediakan dan dikembangkan Pemerintah Kalurahan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rozaki, dkk, 2005, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, Yogyakarta : Ire Press.

Asrori. 2015. Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus. Jurnal Bina Praja. Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni 2014:–116

Prof. Drs. Sugiyono, R&D. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Edisi cetakan ke-2

Rozaki. 2005. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. Yogyakarta: IRE Press

Sukasmanto, Dina Mariana, 2015, Kewenangan dan Perencanaan Desa, IRE Yogyakarta – CCES didukung oleh HIVOS.

Skripsi dan Jurnal

Hapsari, Rima Adhi. (2014). Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung). *Article. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article.*

Lasmana Havizs.(2017). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Panggak, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga).

Maarisit Yonesius. (2016). Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Masalah Air Bersih Di Desa Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kebupaten Siau Tagulandang Biaro. Jurnal Ppkn

Pratiwi Tyas Christin Ade.(2021). Kapasitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Kemuning Lor Kecamatan Anjar Kabupaten Jember *Digital. Journal Repository Universitas Jember.*

Sapriono. (2018). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman)

Sari Wulan Lili. (2020). Kapasitas Pengelola Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Journal Jom Fisip.*

Saukani. (2014) dengan judul Upaya Pemerintah Desa Dalam Menyediakan Sumber Air Bersih Di Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *Journal IP Pisif* https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/

Utama, Diar Budi Prewito, Hendrawan Bayu Pratikno, Hendro Kurniadi, Yanuar Udianto Rahmat, Hayatul Khairul. (2020). Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam Pengurangan Risiko Bencana. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. 7. 591-606. https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

Wardhana Wisnu Irawan, Budihardjo Arief.M, Dan P. Adhesti Scylla. (2013). Kajian Sistem Penyediaan Air Bersih Sub Sistem Bribin Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan.*

Yunanto Eko Sutoro.(2021). Governabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta. Volume 2 Nomor 1 Juni 2021.*

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Kesehatan No.416/PermenKes/IX/1990 tantang kualitas air

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Internet:

http://repository.unej.ac.id/

https://repo.apmd.ac.id.com.

https://scholar.google.com.